



Media Title	Pos Kota		
Head Line	Pemerintah Berpihak Pada Investor		
Date	29 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	4-B	Article Size	
Journalist	Budi Setiawan	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Pemerintah berpihak pada investor

• Standar pelayanan maksimum lemah



Tulus Abadi

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menentang, bahkan menolak mentah-mentah kenaikan tarif jalan tol. Kebijakan ini dinilai tidak adil. Pemerintah lebih berpihak pada investor dan pengelola jalan tol.

“Kenaikan tarif tol itu merupakan kebijakan tidak adil,” kata pengurus YLKI, Tulus Abadi, kemarin.

Bahkan, ia mengungkap transaksional kebijakan tersebut terlalu menguntungkan investor dan pengelola jalan tol. Sebab, ia melihat kebijakan kenaikan tarif jalan diklaim bebas hambatan ini berpijak dari regulasi yang transaksional yang dilegalisasi Undang-Undang (UU) Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang jalan tol.

Sebelum mengetuk kenaikan tarif jalan tol, pemerintah seharusnya mengaudit standar pelayanan maksimum (SPM) dulu. Apa SPM yang diberikan investor dan pengelola jalan tol sudah terpenuhi atau belum. “Dan umumnya hasil audit SPM tersebut ke publik,” tandasnya.

SANGAT LEMAH

Selama ini arus lalu lintas di jalan tol selalu macet, terutama saat jam sibuk. Tak beda dengan jalan biasa. Dari sisi regulasi, Tulus menegaskan SPM jalan tol selama ini sangat lemah. Indikatornya tidak jelas.

Selain itu, ia juga melihat problem pengelolaan jalan tol bukan hanya tarif saja. Terbukti tarif selalu naik, tapi pertumbuhan pembangunan jalan tol sangat lambat. Akibat manut pada kemauan investor dan pengelola agar tarif jalan tol naik setiap dua tahun sekali, masyarakat akhirnya yang menanggung beban.

“Dengan naiknya tarif jalan tol, harga barang jadi naik,” ujarnya. Sebab tidak sedikit truk pengangkut barang lewat jalan tol. Setidaknya, kenaikan tarif jalan tol masuk dalam komponen harga. (budi setiawan/bu)